

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DI MASA LALU MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Oleh:*

FEBRY YOLLANDA

2010113060

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



Pembimbing :

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 13/PK-V/II/2025

	No. Alumni Universitas	Febry Yollanda	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 27 Februari 2002 b. Nama Orang Tua : Novian & Yenny Syam, S.E. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. NIM : 2010113060	f. Tanggal Lulus : 26 Februari 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan i. IPK : 3.67 j. Alamat : Jl. Parak Kopi, No.11, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DIMASA LALU MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022

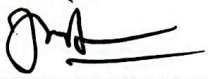
(Febry Yollanda, 2010113060, Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 66 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat merupakan persoalan hukum yang tidak selesai dari masa kemasa dalam riwayat pemerintahan Indonesia. Warisan persoalan ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diupayakan penyelesaiannya melalui Instrumen Hukum berupa Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : pertama, Apakah Keputusan Presiden tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu menurut sudut pandang sistem perundang-undangan Indonesia?; kedua, Apakah penyelesaian melalui Keputusan Presiden itu dapat menutup pintu bagi penyelesaian secara yudisial terhadap pelanggaran HAM di masa lalu?. Untuk menjawab Pertanyaan ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai instrumen yang sah untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di masa lalu, sesuai dengan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Keputusan ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menjadikannya legitim dan relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Kedua, peneliti menemukan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Keputusan Presiden ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian secara yudisial. Meskipun menawarkan alternatif non-yudisial yang dapat mempercepat proses keadilan, masih terdapat ruang bagi proses hukum untuk dilanjutkan. Namun, jika proses non-yudisial dinilai memadai oleh korban atau masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi minat untuk menempuh jalur yudisial di masa mendatang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 26 Februari 2025

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji 1 	Penguji 2 
Nama Terang	Yunita Syofyan, S.H., MH.	Delfina Gusman, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Febry Yollanda	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Medan/ 27 Februari 2002 b. Parents Name : Novian & Yenny Synm c. Faculty : Law d. Concentratio : Constitutional Law e. NIM : 2010113060	f. Graduation Date : February 26 th 2025 g. Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years 6 Mount i. GPA : 3,67 j. Adress : Jl. Parak Kopi, No.11, Kayu Kubu, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi	

SETTLEMENT OF PAST GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CASES THROUGH PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2022

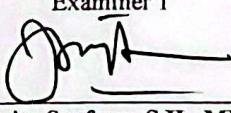
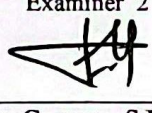
(Febry Yollanda, 2010113060, Contitutional Law (CP V), Faculty of Law, Andalas University, 66 Pages, 2025)

ABSTRACT

Gross Human Rights Violations are a legal issue that has not been resolved from time to time in the history of the Indonesian government. The legacy of this problem during the reign of President Joko Widodo was attempted to be resolved through a legal instrument in the form of a Presidential Decree, namely Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 17 of 2022. There are two problems examined in this thesis, namely: first, whether the Presidential Decree can be used as an instrument for resolving past gross human rights violations from the point of view of the Indonesian legislative system; second, whether the settlement through the Presidential Decree can close the door to judicial settlement of past human rights violations. To answer this question, the author uses the Normative Legal Research Method. The results of the first study, show that the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 17 of 2022 can be viewed as a legitimate instrument to resolve past gross human rights violations, in accordance with the president's duties as head of government. This decree has fulfilled the applicable statutory provisions as the legal basis for the non-judicial settlement of gross human rights violations, making it legitimate and relevant in the Indonesian legal context. Second, researchers found that the resolution of cases of gross human rights violations through this Presidential Decree does not rule out the possibility of judicial resolution. Although it offers a non-judicial alternative that can speed up the process of justice, there is still room for the legal process to continue. However, if the non-judicial process is deemed adequate by victims or communities, this may influence interest in pursuing judicial channels in the future.

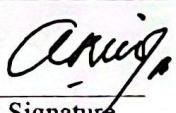
This Minor Thesis has been succesfully defended and regarded to graduate by February 26th 2025

Examiner,

Signature	Examiner 1	Examiner 2
		
Name	Yunita Syofyan, S.H., MH.	Delfina Gusman, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: **Arfiani, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number :

	Faculty/University:	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: